

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan mengingat keinginan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar dalam melaksanakan program dan kegiatan, indikator kinerja dapat selalu diukur sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan yang prioritas dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***Result Oriented Government***). Sedangkan untuk mengetahui akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementrian/Lembaga, **Pemerintah**, Provinsi / **Kabupaten / Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan Unit Kerja Mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, Kecamatan Gurah menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD atau Renstra SKPD, RKPD atau Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gurah dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Kediri, sehingga semua indikator kinerja yang telah direncanakan dapat dievaluasi berapa besar pencapaiannya dalam satu tahun anggaran sehingga

dapat ditentukan seberapa besar dukungan yang dihasilkan terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan dari disusunnya LKjIP Kecamatan Gurah adalah sebagai pedoman Kecamatan Gurah dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan sehingga dapat diukur berapa besar kinerja yang dihasilkan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Selain dari itu LKjIP Kecamatan Gurah disusun agar setiap program dan kegiatan bisa berkesinambungan dan dievaluasi setiap saat.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Gurah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 2013, Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014.
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.4. Gambaran Organisasi

Gambaran Umum Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, kecamatan (Camat) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;

- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

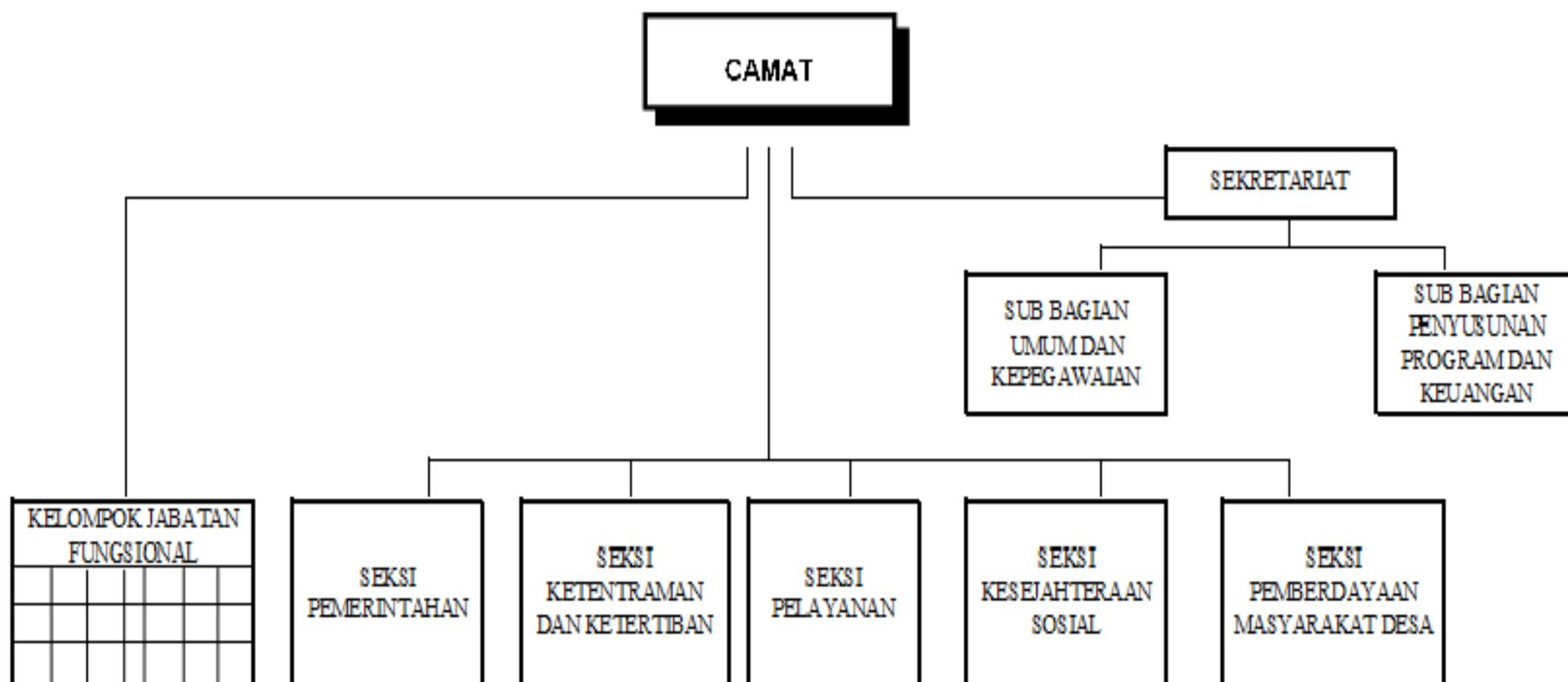
1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Gurah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1, dimana Kecamatan Gurah dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub. Bagian, (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan.

BERDASARKAN DATA DARI SKPD
OPD : TIPE A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : - - 2016

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gurah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Gurah ditetapkan sebagai Kecamatan tipe A di mana camat selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai kecamatan Tipe A, terdiri atas:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Gurah diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Kecamatan Gurah, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2020. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Gurah. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Gurah terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

- a. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.
 - b. Masih kurangnya kinerja aparaturnya pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparaturnya pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
 - c. Laporan Keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor penyebabnya adalah latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
 - d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 program pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi terutama untuk kalangan wanita.
2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi, yaitu :
- a. Pengetahuan masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat sehingga pelayanan masyarakat belum bisa memenuhi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diharapkan.
 - b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan perencanaan dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja di Kecamatan Guruh untuk tahun 2019 tidak mengalami perubahan,

sama dengan di Tahun 2018. Dalam rencana kinerja tahunan di Kecamatan Gurah untuk tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019**

SKPD : KECAMATAN GURAH
TAHUN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	78%
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi	100%

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

SKPD : KECAMATAN GURAH
TAHUN : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	76%
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi	100%

Dari rencana kinerja tahunan diatas jika dibandingkan maka tidak ada perubahan dalam sasaran strategis dan indikator kinerja pada Kecamatan Gurah. Dalam tahun 2019 rencana kinerja tahunan yang disusun mencakup 1(satu) sasaran strategis, sedangkan untuk tahun 2018 mencakup 1(satu) sasaran strategis, yaitu meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman, yang mencakup 2 (dua) indikator kinerja , yaitu :

1. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan
2. Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi

Adapun Rencana Strategis Kecamatan Gurah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan Penetapan Kinerja di Kecamatan Gurah Tahun 2019 sebagaimana lampiran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gurah ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja di Kecamatan Gurah

Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Gurah terkait dengan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Kecamatan Gurah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 dan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagaimana format berikut:

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019**

SKPD : KECAMATAN GURAH
TAHUN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	78%	81,20%	104,1 %
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp 222.875.000
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp 213.514.448 (95,80%)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

SKPD : KECAMATAN GURAH
TAHUN : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	76%	76,16%	100,21 %
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 301.013.700,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 263.612.546,00 (88%)

Berikut disampaikan beberapa analisa terkait capaian kinerja di Kecamatan Gurah untuk tahun 2018 :

- 1) Dari target kinerja tahun 2018 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran kinerja tahun 2018 bahwa dari target yang ditetapkan dalam realisasi target semua dapat direalisasikan, bahkan melebihi dari target.
- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya maka realisasi kinerja tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Realisasi Anggaran pada tahun 2018 sebesar 95,80% atau lebih tinggi 0,8% jika dibandingkan dengan realisasi Anggaran Tahun 2017 sebesar 95,72%.
- 3) Capaian Kinerja yang terkait dengan indikator kinerja Kecamatan Gurah dapat dilihat dari capaian program / kegiatan yang mendukung Capaian Nilai IKM dan Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi, sebagaimana tabel 3.1.1. berikut :

Tabel. 3.1.1.

Indikator Kinerja	Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1. Capaian Nilai IKM	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	99%	99%	140.950.000	132.326.448	93.88%
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	100%	100%	100%	41.550.000	41.332.000	99.48%
2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	100%	100%	23.000.000	22.511.000	97.87%

Untuk kedua indikator tersebut, baik capaian kinerja maupun capaian anggaran rata-rata adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Gurah mampu memanfaatkan alokasi dana yang telah dianggarkan pada tahun 2018 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tercapainya target kinerja tersebut tak lepas dari terjalinnya kerjasama yang baik antara pimpinan SKPD, staf Kecamatan Gurah, Jajaran POLSEK dan KORAMIL wilayah Kecamatan Gurah dalam mengkoordinasikan semua kegiatan di Wilayah Kecamatan Gurah.

1. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gurah dapat dilihat pada tabel 3.1.2. berikut :

Tabel 3.1.2.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	81.20%	96,68%	-0.83%
		Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100%	100%	0%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja telah mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan. Artinya, alokasi dana yang telah dianggarkan dapat dipergunakan dengan seoptimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Gurah.

2. Tidak ada hambatan ataupun kendala yang secara umum dialami oleh Kecamatan Gurah dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya target dan realisasi kinerja pada Tahun 2018.
3. Jika dilihat dari tabel pengukuran kinerja dan dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan maka efisiensi dari segi penganggaran di Bagian Kecamatan Gurah adalah efisien.
- 4) Terhadap pernyataan pencapaian kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran maka seluruh target yang ditetapkan dalam pernyataan pencapaian kinerja dapat tercapai, hal ini dapat terlihat dari pengukuran kinerja di atas.

B. Realisasi Anggaran

Dalam dokumen perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran 2019 maka dari dukungan anggaran guna mencapai perjanjian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI KECAMATAN GURAH TAHUN 2018

OPD : KECAMATAN GURAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2018 (Rp)	PERSEN
1	2	3	4	5
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran		135.500.000	114.062.446	84
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.500.00	7.315.660	77
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.250.000	1.128.500	90
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.463.254	18.528.836	86
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.500.000	1.485.000	99
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.500.000	7.155.000	95
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.500.000	2.452.000	98
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000	1.255.000	83
8	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	7.926.400	79
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	13.000.000	12.040.000	93
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	14.150.000	13.850.000	98
12	Penyedia Jasa Operasional	22.000.000	19.270.000	88
13	Penyedia Jasa Administrasi Barang	8.525.000	7.700.000	90
14	Penyediaan jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis	1.925.000	1.650.000	86
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	19.186.746	10.806.050	56
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		65.000.000	60.673.500	92
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000	5.000.000	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000	2.575.000	86
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.000.000	2.673.500	38
4	Pemeliharaan rutin/berkala Taman/Pagar kantor	2.000.000	2.000.000	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	2.675.000	89
6	Pembangunan Gedung Arsip	45.000.000	45.000.000	100
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.000.000	300.000	30
1	Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	1.000.000	300.000	30
IV. Program Peningkatan Keamanan dan		85.013.700	76.886.600	90

Kenyamanan Lingkungan				
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	10.000.000	8.090.000	81
2	Pembinaan Perangkat di wilayah	75.013.700	68.796.600	92
V. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK		2.000.000	2.000.000	100
1	Operasional Pemberdayaan Masyarakat	400.000	400.000	100
2	Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok kerja 1	400.000	400.000	100
3	Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok kerja 2	400.000	400.000	100
4	Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok kerja 3	400.000	400.000	100
5	KPemberdayaan Masyarakat melalui kelompok kerja 4	400.000	400.000	100
VI. Program Pengelolaan Keragaman Budaya		3.000.000	2.850.000	95
1	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah	3.000.000	2.850.000	95
VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah		4.500.000	4.490.000	100
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	4.500.000	4.490.000	100
VIII. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa		5.000.000	3.100.000	62
1	Asistensi ,Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	5.000.000	3.100.000	62
TOTAL		301.013.700	263.612.546	88

Jika dilihat dalam laporan realisasi anggaran diatas maka penggunaan anggaran guna mendukung pencapaian pernyataan kinerja adalah tercapai yaitu sebesar 88 % anggaran yang direncanakan terserap untuk merealisasikan pencapaian kinerja yang dibuat.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gurah Tahun 2018 disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan pengukuran akuntabilitas bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman demi kesejahteraan masyarakat.

Gurah, Januari 2019

CAMAT - GURAH

H.AHMAD WITO SUBAGYO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 1966012 19923 1 011

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (
L K j I P)
KECAMATAN GURAH



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2018